



Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013 *Evaluation of the Mid-Term Development Plan Besadi Village Kuala District Langkat Regency 2013*

Makmur Ginting ^{1)*}, Muhammad Aswin Hasibuan ²⁾, Rudi Salam Sinaga ³⁾

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan
Area, Indonesia

Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan
Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil evaluasi dari rencana pembangunan jangka menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Melalui penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2013 di Desa Besadi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik. Secara umum pelaksanaannya dimulai dari pelaksanaan Musrenbang, pembentukan tim perencana dan tim pemandu pelaksanaan RKPDes, pengkajian dan analisis data kerawanan desa atau analisis keadaan darurat desa dalam penyelenggaraan kegiatan dilakukan dengan swakelola, yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya. Data menunjukkan kegiatan pelaksanaan pengadaan jalan dilakukan karena bertambahnya jumlah penduduk di Desa Besadi. Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pembangunan di Desa Besadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2013 di Desa Besadi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik. Secara umum pelaksanaannya dimulai dari pelaksanaan Musrenbang, pembentukan tim perencana dan tim pemandu pelaksanaan RKPDes, pengkajian dan analisis data kerawanan desa atau analisis keadaan darurat desa dalam penyelenggaraan kegiatan dilakukan dengan swakelola, yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya.

Kata Kunci: Evaluasi, Pembangunan Jangka Menengah, Desa.

Abstract

This study aims to see the results of the evaluation of the mid-term development plan for Besadi Village, Kuala District, Langkat Regency in 2013. The type of research used is qualitative through a descriptive approach. Sources of data in this study using interviews, literature study and documentation study. Through this research, it was found that the implementation of the 2013 Medium-Term Village Development Plan (RPJMDes) in Besadi Village, starting from planning to implementation, had gone quite well. In general, the implementation starts from the implementation of the Musrenbang, the formation of a planning team and a team to guide the implementation of the RKPDes, study and analysis of village vulnerability data or analysis of village emergencies in the implementation of activities carried out with self-management, namely self-management of village government and labor-intensive self-management. The data shows that road procurement activities were carried out due to the increasing population in Besadi Village. Community participation is a supporting factor in development in Besadi Village. The conclusion of this study is that the implementation of the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes) 2013 in Besadi Village, starting from planning to implementation, has gone quite well. In general, the implementation starts from the implementation of the Musrenbang, the formation of a planning team and a team to guide the implementation of the RKPDes, study and analysis of village vulnerability data or analysis of village emergencies in the implementation of activities carried out with self-management, namely self-management of village government and labor-intensive self-management.

Keywords: Evaluation, Development Intermediate ranges, Village.

How to Cite: Ginting, Makmur, Hasibuan, M. A & Sinaga, R. S. (2020). Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2) 2020: 68-78.

*E-mail: makmurginting@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Pembangunan daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah merupakan tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Keberadaan dari pada Undang-undang ini sebagai respon dari aspirasi berbagai daerah yang merasakan perlunya pendelegasian sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut sebagai upaya daerah untuk dapat berbuat lebih cepat dalam tahapan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah memberikan konsep otonom dan desentralisasi yang terfokus pada sebagian urusan yang semestinya dikelola pemerintah pusat kini setelah terbitnya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah maka sebagian urusan tersebut menjadi kewenangan pemerinah daerah. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota saat ini memiliki anggaran finansial masing-masing yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berikut postur APBD yang terpola secara berbeda namun dengan asas proporsional.

Dengan semakin kuatnya keinginan pemerintah pusat terhadap terwujudnya pembangunan di daerah melalui konsep otonom dan desentralisasi maka kini telah menjadi tugas pemerintahan daerah untuk dapat meningkatkan pembangunan di berbagai belahan wilayah administrasi termasuk pada unit terkecil dari wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu desa.

Desentralisasi (Hardiansyah dkk., 2019) merupakan suatu bentuk tata pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan tidak terpusat, melainkan menyebar ke daerah-daerah. Untuk memahami pengertian desentralisasi, kita perlu juga memahami istilah 'sentralisasi'. Kedua istilah tersebut memiliki hubungan yang antonim.

Desa sebagai titik konsentrasi masyarakat berkumpul dan desa dalam arti pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat desa diuntut harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat desa. Bentuk-pentuk pelayanan tersebut dapat menggunakan berbagai pendekatan pembangunan infrastruktur, administrasi kependudukan hingga pada pendekatan yang berdampak pada peningkatan aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat di desa.

Untuk memperoleh suatu target pembangunan desa yang terencana maka diperlukan suatu perencanaan yang komperhensif dan sistematis yang berwujud tulisan dan kemudian digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan tersebut, perencanaan seperti ini secara kelembagaan di kenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dengan adanya RPJMDes maka pemerintah desa telah memiliki target-target sasaran yang akan dibangun melalui

berbagai langkah-langkah yang telah ditetapkan secara bersama. Penelitian ini bertujuan melakukan Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Jenis data pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-Data. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik snowballing, melalui teknik ini penentuan informan akan bergantung pada informan kunci, informan kunci akan menginformasikan kepada peneliti pihak mana yang relevan untuk dijadikan informan dalam mendukung informasi yang diperlukan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Observasi menurut Kusuma dalam Sugiyono (2009) adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner.

McDrury (Collaborative Group Analysis of Data, 1999) seperti yang dikutip Moleong (2007) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: a) Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data; b) Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data; c) Menuliskan 'model' yang ditemukan; d) Koding yang telah dilakukan. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang di dengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010). Sedangkan data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka (Arikunto, 2010).

Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, dengan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Sulistyo dan Basuki, 2006). Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dokumen menurut Sugiyono, (2009) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah dijalankan. Ia digunakan dalam berbagai macam bidang, terutama dalam lingkup perusahaan, proyek ataupun pekerjaan lain yang berhubungan dengan sistem. Setiap aktivitas tentu dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapai, termasuk kegiatan evaluasi. Melalui evaluasi, Anda dapat mengetahui tingkat kemajuan kegiatan, tingkat pencapaian berdasarkan tujuan, dan hal-hal yang perlu dilakukan di masa mendatang. Secara spesifik, berikut ini adalah beberapa tujuan dilakukannya kegiatan evaluasi : 1) Mengetahui tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan standar dan kebutuhan organisasi; 2) Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dilakukan diagnosis serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan objek evaluasi; 3) Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sebuah media, metode, atau sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah kegiatan; 4) Memberikan umpan balik dan informasi penting untuk memperbaiki kekurangan dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan (Qhilby dkk., 2017).

Meskipun setiap kegiatan evaluasi memiliki tahapan berbeda, ada beberapa tahapan evaluasi yang berlaku secara umum (Siregar dkk., 2016), seperti berikut ini : 1) Menentukan aspek yang akan dievaluasi, sebuah kegiatan atau program pasti dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aspek atau komponen yang saling mendukung. Untuk dapat mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan, perlu dilakukan evaluasi terhadap setiap aspek; 2) Mendesain kegiatan evaluasi yang akan dilakukan, agar kegiatan evaluasi tepat sasaran dan bisa menghasilkan *output* yang diinginkan, anda

perlu merancang lebih dahulu sistem evaluasi yang akan dilakukan. desain evaluasi meliputi data yang dibutuhkan, metode evaluasi, hasil yang diinginkan, dan sebagainya; 3) Mengumpulkan data evaluasi, setelah desain evaluasi selesai dibuat, Anda bisa mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan metode dan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; 4) Menganalisis dan mengolah data, data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diolah; 5) Melaporkan hasil evaluasi, pada tahap terakhir, Anda harus melaporkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan agar bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Untuk itu, hasil evaluasi perlu didokumentasikan secara tertulis dan disimpan dengan baik.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 (Setiadi dkk., 2018) bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya secara berjangka meliputi: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJM Desa maupun RKP Desa, keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan dan menjadi dasar pedoman dalam penyusunan APB Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik, sedangkan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal akhir bulan September tahun berjalan.

RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam penyusunan RPJM Desa, Kepala Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Berikut ini tahapan penyusunan RPJM Desa: Tahap 1 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa; Tahap 2 Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota; Tahap 3 Pengkajian Keadaan Desa; Tahap 4 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa; Tahap 5 Penyusunan Rancangan RPJM Desa; Tahap 6 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Tahap 7 Penyempurnaan dan Penetapan Rancangan RPJM Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 (Panjaitan dkk., 2019) terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaiman kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada penelitian, peneliti mendapati bahwa dalam penyelenggaraan suatu program atau suatu kegiatan terkadang terkendala suatu hambatan yang bisa memperlambat atau bahkan membuat program itu menjadi tertunda. Pada bagian ini terdapat 2 (dua) sub bagian dari faktor

penghambat, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari pemerintah desa itu sendiri, sedangkan faktor penghambat eksternal merupakan faktor penghambat yang bersumber dari lingkungan desa, bisa dari pertumbuhan penduduk maupun keadaan alam atau situasi kondisi cuaca yang tidak terprediksi.

Faktor penghambat eksternal adalah sebagai berikut: 1) Semakin meningkatnya jumlah penduduk Desa Besadi tiap tahunnya, semakin membuka isolasi pemukiman penduduk baru. Kreditan kavlingan rumah yang dikembangkan oleh para pengembang tradisional (tuan takur atau tuan tanah) berhamburan disana sini laksana jamur di musim hujan. Akibatnya jalan-jalan dan gang-gang kavlingan semakin banyak jumlahnya dengan keadaan tidak/belum diperkeras serta belum berupa badan jalan. Lajunya pertambahan jumlah jalan, jalan jembatan, jembatan gang, parit dan gorong-gorong tersebut, mengalahkan lajunya pembangunan pengerasan dan semenisasi jalan dan gang; 2) Para pengembang tradisional penjual tanah kavlingan (tuan takur/tuan tanah) tidak mengadakan parit/saluran air yang memadai pada daerah dikembangkannya;

Masyarakat yang bermukim di daerah pemukiman baru tersebut selalu berorientasi membangun rumah beton, hal tersebut membuat badan jalan atau gang sekamin ambles, becek dan berlubang akibat beban berat kendaraan roda enam pengangkut material (pasir, batu, semen). Pembuatan rumah beton tersebut diperkirakan salah satu penyebab lingkungan banjir disetiap musim hujan, karena saluran-saluran air banyak yang tertutup. Pada umumnya lingkungan baru tersebut sangat jauh dari balai pengobatan maupun sekolah serta belum ada posyandunya sehingga labil terhadap penyakit seperti demam berdarah maupun muntaber (kolera). Pada saat proses pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala dengan cuaca iklim yang tidak menentu.

Faktor pendukung merupakan salah satu kunci keberhasilan dari suatu pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (dalam artian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Hal ini yang diterapkan pada pemerintahan desa di Desa Besadi, yang tercantum dalam visi dan misi desa.

Keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan desa tidak terlepas dari peran serta atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang ada. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan pembangunan di Desa Besadi.

Kebutuhan desa harus diletakkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang mencakup identifikasi dan penilaian (*assessment*) secara komprehensif. RPJM Desa meletakkan dasar-dasar filosofis dan sosiologis bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan merujuk hasil analisis konflik dan kelembagaan, perumusan visi, termasuk juga program aksi yang bersifat strategis. Program perdamaian secara mendasar ditetapkan melalui sebuah rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan desa ke depan. RPJM Desa merupakan respon masyarakat dari suatu proses belajar yang mempertemukan situasi, kebutuhan, tujuan dan rencana aksi terhadap visi pembangunan serta perubahan jangka panjang. Prinsip dan kerangka kerja strategis ini menjadi dasar bagi pemerintahan desa, masyarakat serta pemangku kepentingan lain dalam mengembangkan merumuskan kebijakan dan program pembangunan

dengan menentukan fokus tindak lanjut penanganan konflik dan pelestarian perdamaian (Supeno, 2011).

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di wilayah Desa Besadi pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan yang ada di Desa Besadi sendiri secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan) meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemamfaatan teknologi tepat guna.

Adapun prinsip pokok dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang terdiri dari: 1) Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan di pertanggung jawabkan, baik secara moral, teknis, maupun administrative; 2) Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya; 3) Keberpihakan pada Orang/Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung; 4) Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola; 5) Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan; 6) Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas; 7) Kesenjangan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut; 8) Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan; 9) Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Besadi strategi yang dikembangkan adalah menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran menguatkan sistem pembangunan partisipatif masyarakat, untuk melakukan kegiatan yang dapat menunjang atau meningkatkan kapasitas masyarakat sesuai dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri dengan memperhatikan jenis usulan agar yang diusulkan atau diajukan bisa didanai atau dapat direalisasikan oleh program itu sendiri karena kegiatan masyarakat yang diusulkan juga bisa ditolak atau tidak diterima dan tidak bisa didanai (Wawancara dengan Tuahta Sitepu, Ketua LPMD Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat).

Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, didukung sumberdaya yang ada, dan upaya pelestarian kegiatan. Prasarana dan sarana yang dipilih harus

mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Besadi.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 di Desa Besadi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik. Secara umum pelaksanaannya dimulai dari pelaksanaan musrenbang, pembentukan tim perencana dan tim pemandu pelaksanaan RKPDes, pengkajian dan analisis data kerawanan desa atau analisis keadaan darurat desa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen desa oleh Kepala Desa, lalu disusun dan ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKPDes. Proses ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Realisasi Pelaksanaan Program Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes):

Bidang Sarana

Secara umum tujuan pembangunan prasarana dan sarana yang ada di desa Besadi adalah suatu pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyeleggaraan pembangunan desa serta peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau sesuai dengan bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan khususnya seperti yang di paparkan oleh Kepala Desa Besadi yaitu membangun prasarana dan sarana pendukung di Desa-desa Se Kecamatan Kuala yang membutuhkan, dan diperuntukkan untuk: 1) Menciptakan lapangan kerja di desa, terutama bagi rumah tangga miskin; 2) Meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam dalam melaksanakan kegiatan; 3) Meningkatkan kualitas kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana; 4) Meningkatkan kepastian Tim Pengelola Kegiatan dan atau Tim Pelaksana Pemeliharaan Prasarana, dalam pengelolaan kegiatan; 5) Meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, monitoring dan pemeliharaan prasarana, dalam teknis pelaksanaan (Wawancara dengan Bengis, op.cit)

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Prasarana

Peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan prasarana dan sarana di Desa Besadi seperti yang dijelaskan oleh Seksi Kesejahteraan Sosial Mariani Br. Tarigan bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a.

Metode perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus difokuskan untuk menumbuhkan rasa memiliki oleh masyarakat yaitu : 1) Meningkatkan keahlian masyarakat terutama dalam bidang teknis dan administrasi kegiatan prasarana, 2) Mengefektifkan lembaga lembaga yang ada di Desa, baik formal atau informal, 3) Memperoleh kualitas desain dan pekerjaan yang sesuai dengan setandar teknis dan biaya yang efisien; b. Usulan didasarkan pada pandangan masa depan yang dihasilkan secara musyawarah, dengan mengutamakan mampaat bagi rumah tangga miskin; c. Kegiatan yang di bangun tidak boleh ada dampak yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat; d. Sejauh mungkin memanfaatkan potensi sumber daya lokal, baik

sumber daya alam maupun sumber daya manusia setempat; e. Tenaga kerja yang ikut partisipasi dalam kegiatan, dibayar insentif secara penuh; f. Sistem perencanaan dan pengelolaan dibuat sederhana, agar mudah dimengerti, mudah dikelola masyarakat sendiri, dan mudah direvisi dengan alasan yang kuat; g. Segala informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan diumumkan dan disampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya; h. Pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun menjadi tanggung jawab masyarakat bersama pemerintah Desa; i. Masyarakat harus dilatih untuk memelihara prasarana dan sarana yang telah dibangun; j. Harus terjadi alih teknologi dalam masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan cara pengelolaan pemeliharaan, melalui pelatihan dengan cara bekerja sambil belajar. (Wawancara Dengan Mariani Br. Tarigan).

Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan): a. Tahap perencanaan/desain, pada tahapan ini dilakukan penguatan kapasitas masyarakat yang berminat, meliputi cara melakukan survei perencanaan; b. Tahapan pelaksanaan, tahapan ini dilakukan penguatan kepastian kepada kepala dusun, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat pekerjaan meliputi cara melaksanakan pekerjaan sesuai standar teknis; Tahap pemeliharaan c. Pada tahap ini dilakukan penguatan kepada Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP3) tentang organisasi teknis pemeliharaan.

Kegiatan yang diusulkan untuk bidang prasarana dan sarana bersifat *open menu* artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja sejauh usulan tersebut tidak merusak ataupun mengganggu kehidupan bermasyarakat. Semua usulan masyarakat semestinya sesuai dengan tujuan bidang prasarana dan sarana yaitu benar-benar dibutuhkan masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan ekonomi, derajat kesejahteraan, pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan (hasil berkualitas, bermanfaat, dan dipelihara). Adapun contoh jenis prasarana dan sarana yang diusulkan masyarakat, yaitu: a. Jalan, antara lain: Pengaspalan dan saluran drainase; b. Jembatan, antara lain: Jembatan gantung, jembatan gelagar kayu, jembatan beton; c. Air bersih antara lain: Sumur bor, sumur gali, penjernihan air, perpipaan, MCK (Mandi Cuci Kakus), listrik, pompa air, irigasi, pembangunan atau rehabilitas gedung sekolah, posyandu, TK

Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokrasi pada musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Sejalan dengan prinsip open menu, semua jenis kegiatan pendidikan formal dan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin.

Adapun tujuannya adalah antara lain: Mempercepat upaya peningkatan sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin perdesaan sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Adapun tujuan khususnya: 1) Meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa miskin dengan prioritas pendidikan dasar 9 tahun melalui pemberian beasiswa; 2) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui bantuan prasarana dan sarana pendidikan; 3) Meningkatkan kepedulian orang tua siswa rumah tangga miskin terhadap

pentingnya pendidikan; 4) Meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin perdesaan melalui pelatihan bagi pemuda putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga untuk menciptakan daya saing dan lapangan kerja.

Sasaran dan jenis kegiatan bidang pendidikan kelompok menerima mamfaat kegiatan pendidikan adalah rumah tangga miskin seusia sekolah, SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA di Desa Besadi, yaitu: 1) Peningkatan pelayanan pendidikan adalah kegiatan pendidikan yang meliputi akses, mutu dan manajemen pendidikan. Untuk memudahkan masyarakat (rumah tangga miskin) mendapatkan akses pelayanan pendidikan; 2) Pengembangan wawasan dan kepedulian, bantuan pengembangan wawasan dan kepedulian dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bagi rumah tangga miskin tentang pentingnya pendidikan baik formal maupon non formal.

Bidang Kesehatan Masyarakat yang ada di Desa Besadi merupakan sektor yang masih cukup tertinggal, khususnya bagi kalangan yang berpenghasilan rendah. Dari situlah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Besadi mengembangkan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat melalui penyadaran dan perubahan perilaku, penyediaan bantuan bidang layanan kesehatan masyarakat khususnya rumah tangga miskin. Dengan kegiatan layanan bidang kesehatan diharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam RPJMDes ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dan mendorong pelayanan kesehatan yang naik kepada semua kalangan. Tapi dengan besar hati harus diakui bahwa disamping berbagai kemajuan, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Penjaminan kesehatan bagi masyarakat bukanlah perkara yang mudah dan murah. Diperlukan kontribusi yang positif dari seluruh masyarakat. Karena menurut Seksi Kesehatan Kependudukan dan KB, Carin Br. Sebayang tiga pilar penyangganya yaitu: 1) Para ahli kesehatan (Dokter, Suster, Ahli Obat dan Sebagainya); 2) Rumah Sakit (Klinik); 3) Pengadaan obat-obatan.

SIMPULAN

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 di Desa Besadi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik. Secara umum pelaksanaannya dimulai dari pelaksanaan musrenbang, pembentukan tim perencana dan tim pemandu pelaksanaan RKPDes, pengkajian dan analisis data kerawanan desa atau analisis keadaan darurat desa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen desa oleh Kepala Desa, lalu disusun dan ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa Tentang RKPDes. Proses ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam penyelenggaraan kegiatan dilakukan dengan swakelola, yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya. Penyelenggaraan swakelola ini dilaksanakan agar para warga juga dapat turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Besadi. Banyak kegiatan yang dilakukan dengan swakelola padat karya, pembangunan yang ada merupakan usulan dari masyarakat untuk dilaksanakan secara padat karya. Dari data yang ada banyaknya kegiatan pelaksanaan pengadaan jalan dilakukan karena semakin bertambahnya jumlah penduduk di Desa Besadi sehingga mulai banyak rumah yang dibangun dan masyarakat juga membutuhkan sarana atau akses jalan yang baik untuk menuju rumah mereka. Partisipasi masyarakat menjadi

faktor pendukung dalam pembangunan di Desa Besadi. Banyak kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan atau dikerjakan langsung oleh masyarakat, hal ini bisa dilihat dari kegiatan gotong royong yang dimana masyarakat atau para warga memberikan waktu atau meluangkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan. Dengan adanya turut serta pemerintah desa yang turun langsung dalam kegiatan, membuat warga merasa senang sehingga adanya hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta.
- Hardiansyah, M. Nasution, M.A. & Matondang, A. (2019). Efektivitas Pelayanan Perangkat Desa oleh Kepemimpinan Kepala Desa (Datuk Penghulu) Tahun 2017. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 1-5.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Panjaitan, E. Dewi, R. & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 32-38.
- Siregar, A.B., Kusmanto, H. Isnaini. (2016), Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kabupaten Langkat Tahun 2015, *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (1): 13-19.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, Wahjudin, 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Banda Aceh, The World Bank.
- Setiadi, Nasution, I, Matondang, A (2018). Analisis Tugas Dan Fungsi BAPPEDA terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *PERSPEKTIF*, 7 (2): 35-39.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Qhilby, Tarigan, U. & Dewi, R (2017). Evaluasi Prosedur Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Camat. *PERSPEKTIF*, 6 (2): 88-97.